

The Concept of Wealth Distribution in Islamic Economics: A Case Study in Indonesia

Konsep Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam: Studi Kasus di Indonesia

Nadhiya' Ulkhaq¹, Muslimah², Widia Ayu Reza Amelia³
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Kota, Negara^{1,2,3}
✉ nadhiya.ulkhaq@mhs.uingusdur.ac.id

Submitted: 2024-12-12

Revised: 2025-11-20

Accepted: 2025-11-20

ABSTRACT

*Wealth distribution is a major issue in modern economies, including Indonesia, where most wealth is concentrated among certain groups, leaving the majority of the population in poverty. This study examines the concept of wealth distribution in Islamic economics and its implementation in Indonesia. Using a qualitative method based on literature review, this study finds that the main principles of wealth distribution in Islamic economics are justice and compassion. Justice includes balanced distribution in accordance with widely accepted norms of justice, while compassion emphasises social solidarity through instruments such as *zakat*, *infak*, and *sadaqah*. In the Indonesian context, the application of Islamic economics has shown progress through government policies, the role of Islamic financial institutions, and community contributions. However, this implementation still faces significant challenges, including a lack of public understanding, infrastructure limitations, and regulatory barriers. The results of this study are expected to serve as a reference for the development of a more inclusive and sustainable Islamic economy in Indonesia.*

Kata kunci: *wealth distribution, social justice, Islamic economics.*

ABSTRAK

Distribusi kekayaan menjadi isu utama dalam perekonomian modern, termasuk di Indonesia, di mana sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, meninggalkan mayoritas masyarakat dalam kemiskinan. Penelitian ini mengkaji konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam serta implementasinya di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa prinsip utama distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam adalah keadilan dan kasih sayang. Keadilan meliputi distribusi yang seimbang sesuai norma keadilan yang diterima luas, sedangkan kasih sayang menekankan solidaritas sosial melalui instrumen seperti *zakat*, *infak*, dan *sedekah*. Dalam konteks Indonesia, penerapan ekonomi Islam telah menunjukkan kemajuan melalui kebijakan pemerintah, peran lembaga keuangan syariah, dan kontribusi masyarakat. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan



infrastruktur, dan hambatan regulasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: distribusi kekayaan, keadilan sosial, ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Distribusi kekayaan saat ini menjadi isu penting karena berdampak langsung pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan memang memiliki peran penting, tetapi yang lebih krusial adalah bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan. Meskipun para pekerja yang giat dapat meningkatkan kekayaan negara, jika distribusinya tidak merata, sebagian besar kekayaan hanya akan terkonsentrasi pada para kapitalis. Akibatnya, banyak masyarakat yang tetap berada dalam kemiskinan, meskipun negara memiliki kekayaan berlebih. Bahkan di masyarakat modern yang secara umum makmur, distribusi kekayaan yang tidak adil menyebabkan kesenjangan yang signifikan, sehingga sebagian warga masih hidup dalam kemiskinan. Ketidakmerataan ini terjadi karena ada kelompok yang tidak mendapatkan hak mereka, yang pada akhirnya memicu kesedihan dan kemarahan.¹

Islam menganjurkan agar kekayaan didistribusikan dengan adil dan merata di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam kewajiban zakat dan infak, yang mewajibkan umat Muslim untuk berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan. Selain itu, Islam menekankan pentingnya menjauhi sifat keserakahan dan mencari keuntungan dengan cara yang tidak adil. Dalam pandangan Islam, kekayaan juga dianggap sebagai ujian dari Allah, dan harus digunakan untuk tujuan yang baik tanpa merugikan orang lain. Kekayaan dalam Islam tidak dilihat sebagai tujuan utama hidup, melainkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan beribadah kepada Allah. Berdasarkan konsep ini, menarik untuk menganalisis bagaimana mekanisme distribusi kekayaan negara relevan dalam kerangka ekonomi Islam.²

Islam telah mengajarkan segala hal, termasuk mekanisme berbasis moral dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial, terutama dalam aspek ekonomi, khususnya distribusi. Pembahasan mengenai distribusi tidak bisa dilepaskan dari konsep moral ekonomi yang dianut, serta instrumen yang digunakan oleh individu atau negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi dan cara mendistribusikannya. Dalam perekonomian modern saat ini, distribusi memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi, baik dalam distribusi kekayaan maupun pendapatan, melalui kegiatan ekonomi ataupun sosial. Distribusi menjadi salah satu topik utama

¹ Kuni Zakiyah, "Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 37, <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.88>.

² Sri Wahyuni, Muhammad Shabri Abdul Majid, and Muhammad Ridwan, "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2652–66.

dalam teori ekonomi mikro, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis. Hal ini karena distribusi tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan politik, sehingga menjadi perhatian bagi para pemikir ekonomi, baik Islam maupun konvensional, hingga saat ini.³

Pemahaman umat Muslim mengenai distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam masih merupakan isu yang perlu diteliti lebih lanjut. Keberhasilan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik nyata yang berkaitan dengan distribusi kekayaan sangat bergantung pada pemahaman dan pengalaman umat Muslim dalam menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kondisi global saat ini, tantangan yang harus diatasi adalah ketidakseimbangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Ekonomi Islam memberikan pendekatan alternatif yang berfokus pada keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Namun, untuk berhasil menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mencapai pemerataan ekonomi, diperlukan pemahaman dan partisipasi aktif dari umat Muslim dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.⁴

Di sisi lain, distribusi kekayaan telah semakin diabaikan selama beberapa tahun terakhir. Banyak orang mulai merasakan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, hal itu tidak berhasil memberantas atau bahkan mengurangi kemiskinan absolut yang semakin memburuk. Kesenjangan ekonomi perlu segera diatasi, karena jika dibiarkan, hal ini dapat memicu berbagai masalah sosial seperti peningkatan kriminalitas, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta berpotensi mengancam keselamatan akidah. Rasulullah dalam sebuah hadits mengingatkan bahwa kesenjangan ekonomi adalah akar dari kejahatan dan kekacauan masyarakat, yang pada akhirnya dapat membawa kehancuran.⁵

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam telah dibahas oleh Nahdya Alfaina Karem dalam artikelnya yang berjudul *Distribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*. Karem mengulas ketimpangan ekonomi akibat sistem kapitalisme dan menyoroti pentingnya mekanisme distribusi dalam Islam, seperti zakat, infaq, serta konsep bagi hasil sebagai solusi untuk menciptakan keadilan distributif. Penelitian ini juga memaparkan kritik terhadap sistem kapitalis yang menyebabkan ketimpangan kekayaan, serta menekankan bahwa Islam melalui berbagai instrumen distribusi seperti zakat, hibah, dan wakaf, dapat mengatasi ketimpangan tersebut dengan lebih adil. Karem menekankan bahwa mekanisme distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek

³ Bariyyatin Nafi'ah and Sri Haerianingrum, "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 24, <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.809>.

⁴ Muhammad Syahrul Hidayat, "Pemahaman Umat Muslim Tentang Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam: Studi Fenomenologi Tentang Pemerataan Ekonomi," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 72–86, <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.130>.

⁵ Zakiyah, "Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)."

ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual, sehingga lebih komprehensif dalam mengatasi masalah ketimpangan.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Nafi'ah dan Haerianingrum dalam jurnal *Al-Infaq* membahas implementasi nilai-nilai Islam dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Kelebihan penelitian ini adalah pemaparan yang cukup mendalam mengenai pentingnya distribusi kekayaan yang adil dalam perspektif Islam. Penulis juga berhasil membandingkan distribusi dalam sistem ekonomi Islam dan kapitalis, menyoroti peran instrumen-instrumen keuangan Islam seperti zakat, infak, dan wakaf dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.⁷

Namun, kekurangan dari penelitian ini adalah kurangnya penjelasan yang lebih empiris mengenai bagaimana konsep-konsep ini diimplementasikan secara nyata dalam sistem ekonomi modern. Penelitian ini masih bersifat konseptual dan berbasis literatur, tanpa adanya data empiris yang mendukung efektivitas instrumen-instrumen tersebut dalam konteks distribusi kekayaan di negara-negara mayoritas Muslim saat ini. Selain itu, tidak ada analisis komparatif yang menyeluruh mengenai praktik distribusi kekayaan antara negara-negara dengan sistem ekonomi Islam dan sistem kapitalis.

Selanjutnya ada penelitian dari Syarigawir et al dengan judul "Sistem Distribusi Kekayaan Negara dalam Perspektif Islam" yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mencegah penumpukan harta di kalangan orang kaya. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam mengatur distribusi kekayaan agar tepat sasaran dan mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang dasar-dasar distribusi kekayaan dalam Islam dan relevansi instrumen keuangan syariah. Penelitian masih bersifat konseptual, namun kurang memberikan data empiris tentang efektivitas kebijakan distribusi kekayaan dalam konteks modern atau negara tertentu.⁸

Dari semua pembahasan di atas, penulis mencoba untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul "Konsep Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam: Studi Kasus di Indonesia". Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam serta bagaimana penerapannya di Negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu dengan

⁶ Nahdya Alfaina Karem and Yuliani, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif," *Equilibrium* 1, no. 4 (2024).

⁷ Nafi'ah and Haerianingrum, "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan."

⁸ Syarigawir Syarigawir et al., "Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 130–40, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1849>.

mengumpulkan data secara tidak langsung melalui penelaahan terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan berupa jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang terkait dengan materi pembahasan⁹.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis melalui studi pustaka. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan konsep-konsep dan temuan terkait dengan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam dan bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam praktik.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini juga dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif. Metode ini menggunakan pendekatan perspektif internal, di mana fokus analisis terletak pada norma dan konsep hukum Islam. Objek analisis mencakup ketentuan fikih muamalah dan regulasi-regulasi terkait ekonomi Islam, seperti aturan tentang zakat, wakaf, dan distribusi kekayaan dalam sistem syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Distribusi Kekayaan di Indonesia

Ketimpangan kekayaan merupakan fenomena yang semakin nyata di banyak negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika distribusi kekayaan tidak merata, sehingga sebagian besar aset dan sumber daya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat, sementara sebagian besar penduduk lainnya hidup dengan keterbatasan ekonomi. Ketimpangan ini sering kali memicu permasalahan sosial, seperti rendahnya akses pendidikan, layanan kesehatan yang terbatas, serta peluang kerja yang kurang merata. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, namun juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial suatu negara. Upaya untuk mengurangi ketimpangan kekayaan menjadi penting agar tercipta keadilan sosial serta kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Ketimpangan kekayaan di Indonesia merupakan salah satu yang terburuk secara global, menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas sosial.¹⁰ Fundamentalisme pasar telah menyebabkan keuntungan ekonomi cenderung dinikmati oleh golongan kaya. Kebijakan pemerintah yang menyerahkan banyak urusan ekonomi kepada mekanisme pasar dengan anggapan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan dirinya sendiri, nyatanya justru memperkuat ketimpangan. Persaingan bebas dan prinsip fundamental pasar membuat para pelaku kuat mendistorsi pasar untuk meraih keuntungan besar. Fenomena ini juga diperparah oleh meningkatnya praktik *political capture*, di mana orang kaya memanfaatkan pengaruh mereka untuk mengubah peraturan demi keuntungan pribadi. Bentuk kapitalisme kroni seperti ini sangat kentara

⁹ Dimas Assyakurrohim et al., "Case Study Method in Qualitative Research," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9.

¹⁰ Meti Astuti, "Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (818 M-820M)," *At-Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam* 17, no. 2 (2017): 141–55.

di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan kuatnya ikatan antara kalangan kaya dan pemerintah, yang berdampak pada kebijakan yang menguntungkan mereka dan maraknya praktik KKN antara pengusaha, eksekutif, serta legislative.¹¹

Ketimpangan yang parah dapat mengancam keharmonisan dan persatuan masyarakat. Ketimpangan ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, yang menghendaki distribusi sumber daya dan peluang yang adil. Kesenjangan dalam akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur telah menciptakan pemisahan yang merugikan masyarakat. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan publik yang bertujuan mencapai keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketimpangan ekonomi mencakup akses pendidikan yang tidak merata, perbedaan dalam akses kesehatan dan layanan medis, serta ketidakadilan dalam kesempatan kerja dan upah. Distribusi infrastruktur yang tidak merata juga memperparah kesenjangan antarwilayah. Ketimpangan ekonomi ini menghambat potensi pembangunan dan dapat mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, penyebab ketimpangan ini meliputi perbedaan demografi, ketidakmerataan pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, dan perbedaan status sosial di masyarakat.¹²

Selain itu, ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah serius, di mana laki-laki cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan perempuan. Ketimpangan ini juga muncul dalam akses infrastruktur antara desa dan kota, di mana infrastruktur yang lebih baik di perkotaan mendorong ekonomi berjalan lebih lancar daripada di pedesaan. Akibatnya, pendistribusian pendapatan semakin tidak merata. Rendahnya upah bagi kelompok ekonomi bawah turut memperparah kemiskinan. Penghasilan yang rendah berdampak pada kualitas hidup yang terbatas, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan, sehingga menyulitkan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, sistem pajak yang gagal menjalankan fungsi redistribusi pendapatan turut memperbesar kesenjangan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pajak yang tidak jelas dalam hal progresivitas tarif, batas penghasilan bebas pajak, insentif industri, dan pembagian kelas pajak menunjukkan belum adanya visi keadilan dan pemerataan.¹³

Untuk mengatasi masalah kesenjangan yang lebar, pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah. Salah satu langkah yang bisa diambil oleh Pemerintah Provinsi di Indonesia adalah memprioritaskan perencanaan pembangunan di daerah yang masih tertinggal, guna mengurangi

¹¹ M. Anas, Lilia Pasca Riani, and Dian Lianawati, "Potret Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2018 Dengan Indikator Rasio Gini, Kurva Lorentz, Dan Ukuran Bank Dunia," *SEENMEA IV Tahun 2019 Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri*, 2019, 72–83.

¹² Dewi Fatmala Putri and Widya Ratna Sari, "Problematisa Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 163–72, <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.330>.

¹³ Anas, Riani, and Lianawati, "Potret Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2018 Dengan Indikator Rasio Gini, Kurva Lorentz, Dan Ukuran Bank Dunia."

kemiskinan, pengangguran, keterbatasan lapangan kerja, dan masalah lainnya. Untuk membantu wilayah yang kurang berkembang, pemerintah provinsi bisa memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah tersebut. Bantuan berupa subsidi, baik materiil maupun non-materiil, seperti pengiriman tenaga ahli untuk memberikan penyuluhan, dapat mendorong masyarakat untuk mengelola potensi wilayah mereka secara mandiri tanpa harus menunggu arahan dari Gubernur atau Bupati. Selain itu, pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten dan kecamatan juga perlu diperhatikan.¹⁴

Pemerataan ekonomi adalah usaha untuk memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara agar memperoleh pendapatan minimum serta kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan secara adil. Negara-negara miskin sering menghadapi dilema antara fokus pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan. Ketika menekankan pada pertumbuhan, ketimpangan ekonomi berpotensi semakin melebar karena keterbatasan akses warga terhadap modal, sumber daya manusia, dan keterampilan yang rendah. Namun, jika lebih mengutamakan pemerataan pendapatan, negara-negara miskin akan sulit meningkatkan GNP serta taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sama-sama penting, tetapi mencapai keduanya secara bersamaan hampir mustahil.¹⁵

Persoalan ekonomi menjadi rumit ketika berhadapan dengan kenyataan hidup seperti kemiskinan, pengangguran, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa. Ekonomi Pancasila hadir sebagai solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyukai ketimpangan sosial yang muncul. Sistem ekonomi sebelumnya lebih fokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan, sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang cukup besar, menjadikannya kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Perdebatan mengenai sistem ekonomi Indonesia berlangsung lama, hampir seumur dengan kemerdekaan negara. Kapitalisme pernah menjadi sistem ekonomi di Indonesia, dengan memberi kebebasan penuh kepada individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi tanpa intervensi pemerintah, yang kemudian berpotensi menyebabkan monopoli atau oligopoli. Sebaliknya, sosialisme memberikan kebebasan kepada individu dengan campur tangan penuh dari pemerintah, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih egaliter. Kedua sistem ini sangat bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.¹⁶

Prinsip-Prinsip Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

¹⁴ Doni Mahardiki and Rokhedi Priyo Santoso, "ANALISIS PERUBAHAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR PROPINSI DI INDONESIA 2006-2011," *JEJAK Journal of Economics and Policy* 6, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>.

¹⁵ Astuti, "Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (818 M-820M)."

¹⁶ Fatmala Putri and Ratna Sari, "Problematika Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia."

Mengutip dari jurnal penelitian yang berjudul “Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam” karya Ummi Kalsum yang menyatakan bahwa prinsip utama dalam distribusi kekayaan adalah keadilan dan kasih sayang. Keadilan distributif mengacu pada distribusi pendapatan dan kekayaan yang seimbang, sesuai dengan norma-norma keadilan yang diterima secara luas. Keadilan dalam distribusi berarti penilaian yang tepat terhadap faktor produksi dan kebijakan harga, dengan hasil yang sesuai dan wajar. Selain itu, keadilan juga mencakup kebijaksanaan dalam mengalokasikan hasil kegiatan ekonomi kepada mereka yang tidak mampu mengakses pasar atau membeli sesuai dengan kekuatan pasar, melalui cara-cara seperti zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Saw: "Saya bersumpah demi Allah, tidaklah seorang beriman jika ia makan kenyang sementara tetangganya kelaparan." Ayat-ayat dan hadis ini menggarisbawahi bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan harus merata di antara umat manusia, berdasarkan kemampuan fisik, mental, pengetahuan, dan keterampilan mereka dalam kegiatan ekonomi.

Pandangan ini mendukung terciptanya persaudaraan universal, yang pada gilirannya menumbuhkan kesetaraan sosial dan menganggap sumber daya alam sebagai amanah dari Tuhan. Chapra menegaskan bahwa persaudaraan akan kehilangan maknanya tanpa keadilan dalam alokasi sumber daya yang diberikan Allah. Prinsip ini menolak pemusatan kekayaan pada segelintir orang, dan bertujuan untuk mengatasi kemiskinan serta mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Dengan dasar kasih sayang, persaudaraan (ukhwah) yang kuat akan terjalin, sehingga setiap perasaan terhadap saudara akan dirasakan oleh yang lainnya.

Distribusi kekayaan adalah dasar alokasi sumber daya. Ia menekankan bahwa distribusi kekayaan sangat bergantung pada ketidakseragaman kepemilikan. Menurutny, keadilan mutlak mengharuskan adanya perbedaan imbalan, dan bahwa ketidaksetaraan itu sah selama prinsip kesempatan yang sama diterapkan bagi semua orang. Meskipun ketimpangan bisa muncul, Mannan menekankan bahwa pandangannya tidak akan menciptakan kelas kapitalis karena prinsip-prinsip Islam, termasuk kewajiban zakat dan sedekah, menegakkan nilai-nilai keadilan sosial dan memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap orang terpenuhi.¹⁷

Implementasi Konsep Ekonomi Islam di Indonesia

Distribusi kekayaan di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu tantangan utama, di mana kelompok masyarakat tertentu masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan dasar tersebut. Efektivitas

¹⁷ Ummi Kalsum, “Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam Ummi,” *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam LAIN Kendari* 3, no. 1 (2018).

program bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai dan zakat, juga menjadi indikator penting dalam menilai seberapa baik negara memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan menjadi bukti konkret keberhasilan kebijakan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Tak kalah penting, keadilan gender, yang memastikan perempuan memiliki akses setara terhadap sumber daya ekonomi dan peluang kerja, harus terus diperjuangkan.¹⁸ Dengan mempertimbangkan indikator-indikator tersebut, kebijakan distribusi kekayaan dapat ditinjau dan disesuaikan guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata.

Prinsip kasih sayang dalam distribusi kekayaan di Indonesia mencerminkan upaya untuk menciptakan solidaritas sosial dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Salah satu indikator penting adalah program zakat dan sedekah, di mana efektivitas pengelolaan dan distribusi dana ini menjadi tolak ukur perhatian terhadap kelompok rentan.¹⁹ Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, seperti gotong royong atau bantuan komunitas, memperkuat praktik kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari.²⁰ Akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja, juga menjadi cerminan penerapan prinsip ini, memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.²¹ Solidaritas sosial, yang diwujudkan melalui inisiatif pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam membantu kaum miskin dan penyandang disabilitas, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan bersama. Terakhir, pendidikan dan kesadaran sosial berperan penting dalam membentuk budaya berbagi dan saling peduli, dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini.²² Meskipun demikian, tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi masih harus diatasi untuk memastikan prinsip kasih sayang sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan dan praktik distribusi kekayaan. Indikator-indikator ini menjadi panduan penting dalam menilai kemajuan dan dampak upaya tersebut.

Analisis Tantangan Implementasi Ekonomi Islam

Dalam mengimplementasikan sistem ekonomi syariah di Indonesia, berbagai tantangan tidak dapat dihindari. Tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek.

¹⁸ Nunung Nurlaela, "Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis Dan Non Ekonomis Dalam Sistem Ekonomi Islam," *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam* 17 (2017).

¹⁹ Amir Salim, "Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam," *Ekonomika Sharia* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.36908/esha.v5i1.104>.

²⁰ Khalilurrahman, "Etika Distribusi Kekayaan Menurut Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Distribusi)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

²¹ Syahrul Amsari et al., "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.980>.

²² Amsari et al.

Pertama, tantangan politik. Isu ini berkaitan dengan peran pemerintah eksekutif dan legislatif dalam menentukan kebijakan serta regulasi ekonomi. Sebab, pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan akan kebijakan dan regulasi, yang membutuhkan dukungan dari kedua lembaga tersebut.

Kedua, tantangan sosiologis. Tantangan ini terkait dengan kesiapan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sistem ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa selama berabad-abad masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan sistem ekonomi konvensional. Bahkan, sebagian umat Islam sangat mengidolakan sistem ekonomi Barat yang berkembang. Deislamisasi yang berlangsung lama telah menyebabkan pola pikir umat Islam menjadi stagnan dan cenderung skeptis terhadap konsep ekonomi syariah. Menurut Umer Chapra, karena alasan ini, tantangan yang dihadapi ilmu ekonomi syariah lebih kompleks dibandingkan ekonomi konvensional.

Ketiga, tantangan ekonomi masyarakat. Salah satu kendala lainnya adalah kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang menurun. Karnaen A. Perwataatmadja mengungkapkan bahwa situasi ini merupakan dampak dari upaya sistematis penjajahan Belanda yang memperlemah Indonesia, termasuk membatasi akses pendidikan dan memberlakukan hukum yang diskriminatif. Akibatnya, kondisi sosial-ekonomi bangsa menjadi terbelakang, dan dampaknya masih terasa hingga kini.²³

Implementasi ekonomi syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, sehingga dibutuhkan upaya pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, seperti kurangnya tenaga ahli dan minimnya pengembangan teknologi pendukung, turut menghambat operasional institusi keuangan syariah. Dari sisi regulasi, standar yang belum sepenuhnya matang sering kali menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi investor, sehingga diperlukan harmonisasi dan penyederhanaan aturan untuk menciptakan ekosistem yang lebih kondusif. Tantangan lain datang dari persaingan dengan sistem keuangan konvensional yang telah mapan, menawarkan biaya lebih rendah dan aksesibilitas yang lebih mudah, sehingga institusi syariah perlu memperkuat daya saing. Terakhir, keterbatasan inovasi produk menjadi kendala dalam menarik minat konsumen dan investor, sehingga diversifikasi layanan menjadi hal yang mendesak untuk meningkatkan daya tarik industri keuangan syariah di Indonesia.²⁴

²³ Yadi Janwari, "Tantangan Dan Inisiasi Dalam Implementasi Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Abkam : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012): 93–94, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.969>.

²⁴ Admin Ekonomi, "Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Ekonomi Syariah Di Indonesia," Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, 2024, <https://ekonomi.uma.ac.id/2024/07/25/tantangan-dan-peluang-dalam-implementasi-ekonomi-syariah-di-indonesia/>.

KESIMPULAN

Distribusi kekayaan yang adil adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam, bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Islam menawarkan solusi melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Di Indonesia, distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam belum sepenuhnya diterapkan, namun telah menunjukkan perkembangan, seperti kebijakan pemerintah dan peran lembaga keuangan syariah, tantangan besar tetap ada. Hambatan ini mencakup kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan dalam regulasi.

Pemerintah perlu memperkuat pendidikan dan sosialisasi tentang ekonomi Islam, meningkatkan infrastruktur, serta memperkuat regulasi untuk memastikan prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dapat terlaksana. Dengan demikian, implementasi ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Amsari, Syahrul, Sugianto, Ahmad Afandi, and Asmaul Husna. "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.980>.
- Anas, M., Lilia Pasca Riani, and Dian Lianawati. "Potret Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2018 Dengan Indikator Rasio Gini, Kurva Lorentz, Dan Ukuran Bank Dunia." *SSENMEA IV Tahun 2019 Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri*, 2019, 72–83.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Case Study Method in Qualitative Research." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9.
- Astuti, Meti. "Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (818 M-820M)." *At-Tauqī': Jurnal Ekonomi Islam* 17, no. 2 (2017): 141–55.
- Ekonomi, Admin. "Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Ekonomi Syariah Di Indonesia." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, 2024. <https://ekonomi.uma.ac.id/2024/07/25/tantangan-dan-peluang-dalam-implementasi-ekonomi-syariah-di-indonesia/>.
- Fatmala Putri, Dewi, and Widya Ratna Sari. "Problematika Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 163–72. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.330>.
- Hidayat, Muhammad Syahrul. "Pemahaman Umat Muslim Tentang Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam: Studi Fenomenologi Tentang Pemerataan Ekonomi." *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 72–86. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.130>.
- Janwari, Yadi. "Tantangan Dan Inisiasi Dalam Implementasi Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Abkam : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012): 93–94. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.969>.
- Kalsum, Ummi. "Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam Ummi." *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam LAIN Kendari* 3, no. 1 (2018).

- Karem, Nahdya Alfaina, and Yuliani. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif." *Equilibrium* 1, no. 4 (2024).
- Khalilurahman. (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Distribusi)."
- Mahardiki, Doni, and Rokhedi Priyo Santoso. *JEJAK Journal of Economics and Policy* 6, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>.
- Nafi'ah, Bariyyatin, and Sri Haerianingrum. "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 24. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.809>.
- Nurlaela, Nunung. "Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis Dan Non Ekonomis Dalam Sistem Ekonomi Islam." *AT-TAUZI': Jurnal Ekonomi Islam* 17 (2017).
- Salim, Amir. "Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam." *Ekonomica Sharia* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.36908/esha.v5i1.104>.
- Syarigawir, Syarigawir, Srianti Permata, Salfianur Salfianur, and St. Hadijah Wahid. "Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 130–40. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1849>.
- Wahyuni, Sri, Muhammad Shabri Abdul Majid, and Muhammad Ridwan. "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2652–66.
- Zakiyah, Kuni. "Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 37. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.88>.